

ANALISIS INTEGRATIF PRINSIP DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM REFORMASI PENDIDIKAN NASIONAL

Ziyannah Walidah¹, Amelia Veviani², Sri Rahmawati³,
Muhammad Zid⁴, Wini Mustikarani⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Geografi, FISH, Universitas Negeri Jakarta,

¹ ziyannah.walidah@mhs.unj.ac.id, ² amelia.veviani@mhs.unj.ac.id,

³sri.rahmawati@mhs.unj.ac.id, ⁴mzid.unj@gmail.com, ⁵wini.m86@gmail.com

ABSTRACT

The Merdeka Curriculum represents a major educational reform in Indonesia designed to enhance learning quality through curriculum flexibility, authentic assessment, and the strengthening of the Pancasila Student Profile. This study aims to analyze the underlying principles and approaches in the development of the Merdeka Curriculum as well as the key challenges encountered during its implementation in schools. Employing a literature review method, this research synthesizes policy documents, scholarly articles, and relevant theoretical sources through thematic analysis. The findings indicate that the Merdeka Curriculum offers a more adaptive and learner-oriented framework that aligns with the demands of the 21st century and contemporary global developments. The curriculum provides greater autonomy for teachers and schools, encourages project-based learning, and places a strong emphasis on character development. However, the results also reveal several persistent obstacles, including limited teacher readiness to act as curriculum designers, disparities in technological and digital infrastructure across regions, and inconsistent application of authentic assessment practices. These challenges hinder the full realization of learning transformation as intended by the curriculum. Therefore, future educational reform efforts must prioritize continuous teacher professional development, equitable distribution of educational resources, and the cultivation of an innovative school culture. Strengthening these aspects is essential to ensure that the Merdeka Curriculum can be implemented effectively and that the Pancasila Student Profile can be achieved consistently across diverse educational settings in Indonesia.

Keywords: merdeka curriculum, curriculum development, authentic assessment, educational reform, pancasila student profile

ABSTRAK

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu reformasi pendidikan utama di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui fleksibilitas kurikulum, penerapan asesmen autentik, dan penguatan Profil Pelajar Pancasila. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip dan pendekatan yang melandasi pengembangan Kurikulum Merdeka serta mengidentifikasi tantangan utama yang

muncul dalam implementasinya di lingkungan sekolah. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mensintesis dokumen kebijakan, artikel ilmiah, serta sumber teoretis yang relevan melalui analisis tematik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka menawarkan kerangka pembelajaran yang lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik, selaras dengan tuntutan kompetensi abad ke-21 dan perkembangan global. Kurikulum ini memberikan otonomi lebih besar kepada guru dan sekolah, mendorong pembelajaran berbasis proyek, dan menekankan pendidikan karakter sebagai bagian integral dari pembelajaran holistik. Meskipun demikian, hasil kajian mengungkap beberapa kendala yang menghambat efektivitas implementasi, seperti tingkat kesiapan guru yang belum merata dalam berperan sebagai pengembang kurikulum, ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah, serta inkonsistensi dalam penerapan asesmen autentik. Hambatan-hambatan ini berdampak pada tidak optimalnya transformasi pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, reformasi pendidikan ke depan perlu memprioritaskan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan, pemerataan sumber daya pendidikan, dan penguatan budaya sekolah yang inovatif agar Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara efektif dan Profil Pelajar Pancasila dapat tercapai secara konsisten di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: kurikulum merdeka, pengembangan kurikulum, asesmen autentik, reformasi pendidikan, profil pelajar pancasila

A. Pendahuluan

Kurikulum memiliki kedudukan strategis dalam sistem pendidikan karena menjadi dasar pengembangan pengalaman belajar yang mampu membentuk kompetensi dan karakter peserta didik. Menurut El-Astal (2023), kurikulum tidak hanya mengatur apa yang harus dipelajari, tetapi juga menentukan arah pendidikan dalam menjawab kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum merupakan proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk

memastikan pendidikan tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Reformasi pendidikan nasional di Indonesia menunjukkan adanya dinamika perubahan kurikulum sebagai respon terhadap tantangan teknologi, globalisasi, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Marzuqi dan Ahid (2022) menegaskan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia selalu muncul sebagai upaya menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan sosial dan ilmu pengetahuan yang terus bergerak secara cepat. Hal ini

memperlihatkan bahwa kurikulum merupakan entitas yang bersifat adaptif dan tidak dapat dipisahkan dari konteks kemajuan bangsa.

Dalam proses pengembangannya, prinsip-prinsip kurikulum memegang peranan penting agar penyusunannya memiliki arah yang jelas. Suhada, Erihadiana, dan Siregar (2023) menyebutkan bahwa prinsip relevansi, fleksibilitas, kesinambungan, efektivitas, dan efisiensi merupakan fondasi utama yang menjamin kurikulum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik serta tujuan pembangunan nasional. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, kurikulum berpotensi kehilangan relevansi dan tidak mampu menjawab problematika pendidikan di lapangan.

Selain landasan prinsip, pendekatan dalam pengembangan kurikulum juga menentukan kualitas implementasi pembelajaran. Abdah (2019) menjelaskan bahwa pendekatan akademik, humanistik, teknologis, dan rekonstruksi sosial masing-masing memberikan perspektif berbeda dalam merancang pembelajaran. Pendekatan yang tepat akan mempengaruhi bagaimana peserta didik memperoleh

pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual sesuai tujuan pendidikan abad ke-21. Sementara itu, Lutfi et al. (2024) menekankan pentingnya kurikulum yang mampu menghadirkan kompetensi berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi dalam setiap aktivitas pembelajaran.

Melalui agenda reformasi pendidikan seperti Kurikulum Merdeka, pemerintah berupaya mengoptimalkan desain kurikulum yang lebih fleksibel dan berpihak pada peserta didik. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan Putra (2023), reformasi kurikulum masih menghadapi tantangan dalam penyelarasan antara kebutuhan dunia kerja dan pelaksanaannya di sekolah. Oleh sebab itu, analisis integratif terhadap prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kurikulum tidak hanya baik secara konseptual, tetapi juga efektif dalam praktik implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, pengkajian mengenai keterhubungan prinsip dan berbagai pendekatan pengembangan kurikulum menjadi krusial dalam mendukung reformasi

pendidikan nasional agar lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan tuntutan masa depan. Kajian ini juga diperlukan untuk memperkuat orientasi pendidikan Indonesia menuju pembentukan generasi yang berkarakter, kompeten, dan mampu bersaing ditingkat global.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada penelaahan konsep teoritis dan hasil penelitian sebelumnya terkait prinsip serta pendekatan pengembangan kurikulum dalam reformasi pendidikan nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menginterpretasikan berbagai gagasan yang relevan secara mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman konseptual yang lebih komprehensif.

1. Identifikasi Masalah

Tahap awal penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi isu utama dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, terutama terkait kesesuaian antara prinsip dasar kurikulum dan pendekatan yang

digunakan dalam implementasinya.

Fokus ditetapkan pada aspek:

- Prinsip pengembangan kurikulum
- Pendekatan pengembangan kurikulum
- Keterkaitan keduanya dalam reformasi kurikulum nasional

2. Pengumpulan Literatur

Data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder berupa:

- Artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi
- Buku referensi bidang kurikulum dan pendidikan
- Dokumen kebijakan kurikulum terbaru di Indonesia

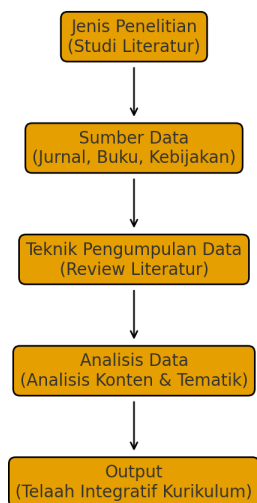
3. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu:

- Mengorganisasi literatur berdasarkan tema utama
- Menemukan pola/benang merah antar konsep
- Menyajikan sintesis dalam bentuk analisis integratif

Analisis ini diarahkan untuk menghasilkan gambaran yang utuh mengenai bagaimana prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum dapat diharmonisasikan

dalam mendukung reformasi pendidikan.



Gambar 1 Bagan Alur Penelitian

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil

1. Identifikasi Prinsip Pengembangan Kurikulum

Berdasarkan hasil telaah pada dokumen kebijakan kurikulum dan literatur terkait, ditemukan bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang menjadi dasar adalah: Relevansi, Fleksibilitas, Kontinuitas, Efektivitas, Efisiensi, dan Keterpaduan. Prinsip tersebut telah menjadi pedoman resmi dalam transformasi kurikulum nasional, termasuk pada Kurikulum Merdeka. Namun temuan menunjukkan bahwa konsistensi penerapannya berbeda antar satuan pendidikan.

2. Analisis Pendekatan Pengembangan Kurikulum

Penelitian menemukan pergeseran orientasi dari pendekatan yang semula berbasis-subjek (subject-centered) pada Kurikulum 2013 menuju pendekatan berbasis-learner (learner-centered) dengan integrasi aspek sosial dan teknologi dalam Kurikulum Merdeka.

Pendekatan utama yang teridentifikasi mencakup:

- Akademik → menjaga kedalaman struktur ilmu
- Humanistik → mengutamakan minat dan kebutuhan peserta didik
- Teknologis → mendukung inovasi pembelajaran
- Rekonstruksi sosial → mengaitkan pembelajaran dengan isu kehidupan nyata

Hasil perbandingan pendekatan tersebut divisualisasikan pada Flowchart Integrasi Prinsip dan Pendekatan.

3. Perbandingan Kebijakan K-13 & Kurikulum Merdeka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi dari Kurikulum 2013 (K-13) menuju Kurikulum Merdeka merupakan perubahan paradigma yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan nasional. K-13

menekankan pencapaian kompetensi melalui struktur kurikulum yang ketat dan terstandarisasi, khususnya dalam aspek materi ajar, pembagian jam pelajaran, dan format asesmen. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka mengusung semangat fleksibilitas, diferensiasi, dan pembelajaran yang berfokus pada perkembangan peserta didik.

Dalam K-13, peran guru cenderung lebih banyak sebagai pelaksana kurikulum yang sudah dirancang secara sentralistik oleh pemerintah. Sementara pada Kurikulum Merdeka, guru diberi ruang untuk menjadi perancang pembelajaran yang harus mampu menyesuaikan capaian pembelajaran dengan konteks satuan pendidikan baik dari sisi karakteristik siswa, potensi wilayah, teknologi, maupun kultur lokal.

Berikut adalah uraian perubahan kebijakan pada aspek-aspek utama:

1) Struktur Pembelajaran

K-13 menggunakan model Kompetensi Inti (KI) – Kompetensi Dasar (KD) yang bersifat rinci dan berlapis, sehingga guru sering mengalami learning overload karena jumlah materi yang

terlalu banyak. Kurikulum Merdeka menyederhanakan hal tersebut melalui Capaian Pembelajaran (CP) berbasis fase perkembangan, sehingga pembelajaran menjadi lebih esensial dan adaptif terhadap kondisi usia peserta didik.

2) Penilaian dan Evaluasi

Penilaian pada K-13 masih didominasi evaluasi kognitif dan sumatif. Pada Kurikulum Merdeka, penilaian diarahkan pada asesmen autentik, portofolio, dan proyek, terutama melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menilai aspek karakter, kreativitas, kepedulian sosial, dan keterampilan kolaboratif.

3) Pemanfaatan Teknologi

K-13 menempatkan teknologi sebagai media alternatif. Kurikulum Merdeka justru menjadikan platform digital sebagai fondasi pembelajaran, seperti penggunaan Platform Merdeka Mengajar, Learning Management System, dan sumber belajar berbasis Open Educational Resources (OER).

4) Otonomi Sekolah dan Peran Guru

Otonomi dalam K-13 masih terbatas; perangkat kurikulum didominasi pembuat kebijakan pusat.

Kurikulum Merdeka mendorong discretion yang lebih luas bagi sekolah dalam:

- Menyederhanakan struktur kurikulum
- Memilih materi kontekstual
- Menentukan strategi asesmen
- Mengembangkan budaya belajar yang sesuai karakter siswa

Sehingga guru menjadi curriculum developer, bukan sekadar pelaksana.

5) Keadilan Pendidikan

Kurikulum Merdeka membawa potensi pemerataan hasil belajar, namun ketimpangan infrastruktur dan literasi digital juga berisiko memperlebar kesenjangan kualitas antar-sekolah.

Aspek	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka
Landasan Pembelajaran	Berbasis kompetensi inti & dasar	Berbasis capaian pembelajaran per fase
Fleksibilitas	Rendah (sentralistik)	Tinggi (otonomi guru dan sekolah)
Orientasi Penilaian	Kognitif dominan	Autentik dan portofolio
Peran Guru	Pelaksana kurikulum pusat	Perancang pembelajaran
Teknologi	Pelengkap	Elemen utama pembelajaran digital
Beban Materi	Cenderung padat dan terpaku buku teks	Esensial, kontekstual dan diferensiatif
Karakter Peserta Didik	Tidak terukur eksplisit	Profil Pelajar Pancasila sebagai fokus

Tabel 1 Perbandingan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka

Pembahasan

1. Kesenjangan Antara Konsep dan Implementasi

Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara idealisme rumusan prinsip pengembangan kurikulum dan realitas penerapannya di satuan pendidikan. Prinsip-prinsip seperti relevansi, fleksibilitas, efektivitas, dan integrasi pengetahuan telah dirumuskan secara matang dalam dokumen kebijakan Kurikulum Merdeka. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan transformasi yang diharapkan.

Pada aspek relevansi, kurikulum sebenarnya dirancang untuk lebih kontekstual dan sesuai perkembangan peserta didik serta kebutuhan era digital. Namun sebagian besar pembelajaran masih berorientasi pada buku teks dan hafalan, sehingga tidak banyak memberikan pengalaman yang mengaitkan materi dengan dunia nyata ataupun isu global. Hal ini menunjukkan bahwa guru memerlukan kompetensi pedagogis yang lebih kuat untuk mengembangkan modul ajar berbasis konteks lokal.

Prinsip fleksibilitas yang diharapkan memberikan keleluasaan guru dalam memilih model

pembelajaran justru menjadi tantangan. Banyak guru mengaku terbiasa bekerja mengikuti perangkat kurikulum pusat. Saat diberi ruang untuk merancang sendiri, sebagian merasa kehilangan arah dan kurang percaya diri, terutama dalam perencanaan pembelajaran diferensiatif dan asesmen autentik.

Prinsip kontinuitas dan efektivitas sebenarnya telah diatur melalui Capaian Pembelajaran (CP) yang disusun berdasarkan fase perkembangan siswa. Namun dalam implementasi ditemui kendala seperti:

- Ketidaksesuaian capaian pembelajaran antar guru dan antar sekolah
- Kesiapan asesmen yang belum merata
- Transisi antar jenjang (PAUD–SD, SD–SMP, SMP–SMA) masih menunjukkan kesenjangan kemampuan literasi dan numerasi.

Aspek efisiensi dan pemanfaatan sarana teknologi masih menjadi masalah besar terutama di daerah 3T. Sekolah dengan infrastruktur lemah sangat bergantung pada metode konvensional, sehingga digitalisasi

pembelajaran tidak sepenuhnya berjalan.

2. Tantangan Transformasi Kurikulum dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Transformasi Kurikulum Merdeka sebagai sebuah kebijakan pendidikan nasional tidak hanya menuntut perubahan dokumen kurikulum, tetapi juga menuntut perubahan budaya belajar, kompetensi guru, sistem evaluasi, dan pemerataan akses sarana pendidikan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa tantangan utama yang muncul dalam tahap implementasi yang berdampak langsung pada kualitas hasil belajar peserta didik.

- 1) Kesiapan Guru sebagai Perancang Kurikulum
Walaupun Kurikulum Merdeka menempatkan guru sebagai curriculum developer, kenyataannya banyak guru yang masih belum menguasai *differentiated instruction*, kesulitan menyusun modul ajar dan asesmen autentik, menganggap P5 hanya sebagai tugas tambahan administratif, minim pelatihan

TPACK (*Technological Pedagogical and Content Knowledge*).

- 2) Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Teknologi
Sekolah di daerah perkotaan lebih siap menerapkan platform Merdeka Mengajar, sementara sekolah di wilayah 3T menghadapi kendala:
 - Keterbatasan perangkat (laptop dan proyektor masih satu untuk semua guru)
 - Jaringan internet lemah atau tidak tersedia
 - Tidak semua guru melek literasi digital
- 3) Ketidakjelasan Implementasi Asesmen Autentik Kurikulum Merdeka menekankan asesmen portofolio dan proyek, namun:
 - Tidak ada standar rubrik yang benar-benar seragam
 - Interpretasi CP masih bervariasi antar guru
 - Administrasi penilaian masih menjadi beban berat

4) Kendala Manajemen Kurikulum di Satuan Pendidikan
Pemimpin sekolah belum sepenuhnya memahami paradigma baru sehingga:

- Inovasi guru sulit memperoleh dukungan
- Supervisi masih fokus pada administrasi perangkat pembelajaran
- Tidak semua sekolah memiliki Tim Pengembang Kurikulum yang aktif

3. Integrasi Pendekatan sebagai Strategi Pemecahan

Kurikulum Merdeka memerlukan strategi pemecahan yang tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Diperlukan integrasi beberapa pendekatan pengembangan kurikulum untuk memastikan pembelajaran dapat menjawab tantangan implementasi di sekolah. Pendekatan akademik, humanistik, teknologis, dan rekonstruksi sosial yang selama ini sering dipisahkan, justru perlu dipadukan menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan dalam praksis pembelajaran.

Pendekatan akademik tetap penting sebagai pondasi untuk

memastikan pembelajaran memiliki kedalaman materi dan keterhubungan dengan disiplin ilmu. Namun pendekatan ini harus dilengkapi oleh pendekatan humanistik agar pembelajaran lebih menghargai keberagaman karakter, potensi, dan perkembangan peserta didik. Dengan penerapan prinsip diferensiasi dan personalisasi pembelajaran, siswa tidak lagi dipaksa mengikuti satu standar tunggal, melainkan diberi ruang untuk berkembang sesuai tahap perkembangannya.

Selain itu, pendekatan teknologis perlu diintegrasikan agar pembelajaran adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi bukan hanya soal tersedianya perangkat, tetapi bagaimana teknologi digunakan untuk memperluas sumber belajar, meningkatkan interaksi, serta mendukung asesmen autentik. Teknologi menjadi jembatan untuk menutup disparitas akses informasi terutama pada satuan pendidikan yang masih minim sumber daya pembelajaran.

Pendekatan rekonstruksi sosial juga memiliki peran strategis, khususnya dalam mendukung

pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Peserta didik belajar melalui pengalaman nyata di masyarakat yang menumbuhkan kepedulian, karakter, dan kemampuan memecahkan masalah sosial-lingkungan di sekitarnya. Hal ini memastikan pendidikan tidak hanya menghasilkan individu berpengetahuan, tetapi juga warga negara yang bertanggung jawab.

Dengan mengintegrasikan keempat pendekatan tersebut secara seimbang, pembelajaran dapat berlangsung lebih bermakna, relevan, dan kontekstual. Guru tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga membantu siswa memahami perannya dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Pendekatan yang saling melengkapi inilah yang diyakini mampu menjawab tantangan implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya terkait kesiapan guru, pemerataan akses teknologi, dan penilaian kompetensi holistik.

4. Implikasi terhadap Profil Pelajar Pancasila

Penerapan Kurikulum Merdeka memberikan pengaruh langsung terhadap penguatan keenam dimensi Profil Pelajar Pancasila. Melalui

pembelajaran berbasis proyek (P5), peserta didik memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman nyata yang mendorong penguatan karakter, kolaborasi, kepedulian sosial, dan keberagaman sehingga dimensi berkebinekaan global dan gotong royong semakin berkembang.

Diferensiasi pembelajaran dan asesmen autentik mendorong peserta didik menjadi lebih mandiri, reflektif, dan mampu menilai perkembangan dirinya sendiri. Sementara strategi pembelajaran yang menuntut pemecahan masalah dan inovasi turut mengasah kemampuan bernalar kritis dan kreativitas.

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa penguatan Profil Pelajar Pancasila belum berjalan merata. Sekolah dengan dukungan sarana, teknologi, dan pelatihan guru yang memadai menunjukkan perkembangan yang signifikan, sedangkan sekolah di wilayah terbatas masih menjadikan P5 sebatas kegiatan tanpa dampak karakter yang kuat.

Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila,

tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan guru dan ketercukupan fasilitas pembelajaran sebagai penopang utama implementasi.

5. Arah Reformasi Pendidikan ke Depan

Transformasi Kurikulum Merdeka ke depan perlu diarahkan pada penguatan pelaksanaan di lapangan. Fokus utama reformasi adalah meningkatkan kompetensi guru sebagai perancang pembelajaran, mempercepat pemerataan infrastruktur digital terutama di sekolah daerah 3T, serta membangun budaya sekolah yang lebih inovatif dan kolaboratif.

Selain itu, supervisi dan evaluasi kurikulum harus menekankan kualitas pembelajaran dan capaian karakter siswa, bukan hanya kepatuhan administratif. Dengan pengawalan yang konsisten dan dukungan sumber daya yang memadai, implementasi Kurikulum Merdeka diharapkan mampu mewujudkan peserta didik yang kompeten dan berkarakter sesuai Profil Pelajar Pancasila secara lebih merata di seluruh Indonesia.

Tabel 2 Tantangan Transformasi Kurikulum

Fokus Tantangan	Akar Permasalahan	Dampak Utama
SDM Guru	Minim pelatihan berkelanjutan	Kurikulum mandiri tidak berjalan
Infrastruktur	Akses teknologi timpang	Ketidakadilan hasil belajar
Assesmen	Standar tidak seragam	Kompetensi siswa tidak terukur tepat
Manajemen Sekolah	Kepemimpinan belum visioner	Inovasi guru terhambat
Budaya Pembelajaran	Mindset masih tradisional	Tidak terjadi transformasi kelas

E. Kesimpulan

Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan relevansi yang lebih tinggi dalam pembelajaran melalui penguatan capaian pembelajaran, penerapan asesmen autentik, serta pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menitikberatkan

pada pengembangan karakter dan kompetensi abad ke-21.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala terutama pada kesiapan guru sebagai perancang pembelajaran, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, serta penerapan asesmen yang belum seragam. Akibatnya, transformasi pembelajaran belum dapat terwujud secara merata di seluruh satuan pendidikan.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka ke depan sangat ditentukan oleh penguatan kompetensi guru, pemerataan sarana dan teknologi, serta pendampingan dan supervisi yang berfokus pada praktik pembelajaran di kelas. Jika dukungan tersebut diwujudkan secara konsisten, Kurikulum Merdeka berpotensi efektif dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Doll, W. E. (1993). *A post-modern perspective on curriculum*. New York, NY: Teachers College Press.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). New York, NY: Teachers College Press.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). *Curriculum: Foundations, principles, and issues* (8th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Print, M. (1993). *Curriculum development and design*. Sydney, Australia: Allen & Unwin.
- Tyler, R. W. (1949). *Basic principles of curriculum and instruction*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Hidayat, A. (2022). Analisis kesiapan guru dalam melaksanakan asesmen autentik. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 22(2), 144–156.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka*.
- OECD. (2019). *Future of education and skills: OECD learning compass 2030*.
- Rahmawati, D. (2023). Transformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kajian Kebijakan Pendidikan*, 18(1), 55–68.
- Zulkifli, M. (2022). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. *Kompas*.
- Ansyar, M. (2015). *The curriculum development in Indonesia: A*

- historical overview. *International Journal of Education and Research*, 3(1), 1–10.
- Daryanto, D., & Karim, S. (2017). Improving the quality of curriculum implementation through teacher competence. *Journal of Education and Practice*, 8(11), 80–87.
- Mulyasa, E. (2013). Implementation of curriculum 2013: The readiness of teachers. *Journal of Education and Learning*, 7(2), 87–98.
- Nurdin, E., & Munzir, M. (2020). Teacher readiness in implementing student-centered curriculum. *International Journal of Instruction*, 13(3), 365–380.
- Suwandi, S. (2019). Kurikulum dan tantangan pembelajaran abad 21. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 1–12.